

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENGENAI
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM KEADAAN
DARURAT YANG MEMBUTUHKAN PEMBEDAHAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JUNCTO PERATURAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN**

ABSTRAK

Penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan sangat terkait dengan masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Agar tercipta transaksi terapeutik yang baik, maka diperlukan adanya persetujuan medik berupa dokumen-dokumen seperti *informed consent*, yang menjadi sebuah data yang dapat menjadi bukti di kemudian hari. Permasalahan terjadi apabila dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pembedahan dan harus mengisi *informed consent*, namun pasien dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam skripsi ini, adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *Informed consent* dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan pembedahan, apakah pelaksanaan *Informed consent* dapat dikesampingkan apabila terjadi hal-hal- darurat dimana pasien tidak dapat memberikan persetujuan, siapa yang berhak memberikan persetujuan apabila terjadi keadaan darurat yang membutuhkan pembedahan, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam hal penanganan pasien dalam keadaan darurat yang membutuhkan pembedahan.

Metode penelitian berupa data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang meninjau dan membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan undang-undang.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *informed consent* dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan pembedahan adalah keadaan dimana pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani oleh dokter dalam hal tindakan medis besar atau beresiko seperti dalam kasus operasi/pembedahan, namun dikarenakan adanya resiko yang mungkin terjadi, maka harus dilakukan persetujuan terlebih dahulu berupa penandatanganan *informed consent*. Namun, persetujuan tindakan kedokteran dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan tindakan segera dari dokter, dimana pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak diperlukan *informed consent*. Pihak-pihak yang berhak memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Pengaturan Undang-Undang Praktik Kedokteran bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada dokter dan pasien, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi. Dokter memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan sesuai dengan standar profesi dan standar operasional dan telah dilindungi oleh Undang-Undang khusus mengenai Praktik Kedokteran.

Kata Kunci : *Informed Consent* dalam keadaan darurat , Perlindungan Hukum bagi Dokter

**JURIDICAL ANALYSIS LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS
ASSOCIATED WITH THE APPROVAL OF THE REGULATION ON
MEDICAL ACTION IN STATE OF EMERGENCIES REQUIRED SURGERY
BASED ON ACT NUMBER 29 YEAR 2004 ABOUT MEDICAL PRACTICE
JUNCTO HEALTH MINISTER REGULATION NUMBER 290 YEAR 2008
ABOUT INFORMED CONSENT**

ABSTRACT

The held of health development efforts is strongly related with problem in health service to society. In order to create a good therapeutic transaction , it require the approval of the form of medical documents such as informed consent, which could be use as data for a proof in the next time. The main problem is when in the state of emergency who required surgery and requied to fill out an informed consent, but the patient is unable to fill the form as approval. The main purpose and objectives to be achieve in this thesis is to know what is the meaning of informed consent in the state of emergency who need surgery as medical action. Could the implementation of informed consent waived in the case of emergency where the patient unable to give a permission, who is entitled to give permission in case of an emergency situation that required surgery. And to know how the protection from legal perspective for doctor in medical treatment for patient at the state of emergency who required surgery.

Research methods in the primary data is legislation, court decisions, and secondary data is literature, journals, and research . The approach that used in this thesis is a normative juridical analysis and discuss the research object from the standpoint of law and legislation.

The conclusion in this research is informed consent in the state of emergency that required medical action as surgery, is a condition where the patient who are in the state of emergency that required an immediately treatment from doctor where this act has a high risk such as surgery or operation. But due to the high risk from medical treatment, the approval by sign in the inform consent form become a priority to be done before the medical act. However from medical perspective, in the emergency situation for the example where the patient is not conscious and need immediately treatment from the doctor , the approval of medical action by sign in the informed consent is not required. From legal perspective the parties who entitled to give an approval for medical action is competent patient or the family who accompany. The aims in Medical Practice Act is to provides protection for doctor, dentist,the patient, and it also give protection for society. Doctors carry out all the legal protection in accordance with professional standards and operational standards and has been protected by a special Law on Medical Practice.

Keywords : Informed Consent in an emergency, Legal Protection for Doctors

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	6
C. Tujuan	6
D. Kegunaan	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

A. Perkembangan Konsep Perlindungan Hukum	19
1. Konsep Negara Hukum.....	20

2. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Praktik Kedokteran	22
B. Perjanjian Terapeutik Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Asas-Asas Perjanjian	29
3. Resiko Dalam Perjanjian	32
4. Perjanjian Terapeutik	34
5. Konsep Hukum Dalam Perjanjian Terapeutik	36
6. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik	37
7. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Terapeutik	39

**BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN INFORMED CONSENT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN JUNCTO PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DALAM
TRANSAKSI TERAPEUTIK**

A. Persetujuan Tindakan Medik / Informed Consent.	46
1. Pengertian Informed Consent	46
2. Pengaturan Informed Consent	48
3. Bentuk Informed Consent	50
4. Penjelasan Mengenai Informed Consent	52
5. Fungsi dan Tujuan Informed Consent	54
B. Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik	56

**BAB IV ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
MENGENAI PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
DALAM KEADAAN DARURAT YANG MEMBUTUHKAN
PEMBEDAHAN**

A. <i>Informed consent</i> dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan	67
B. Pelaksanaan <i>Informed consent</i> yang Dikesampingkan Apabila Terjadi Keadaan Darurat Dimana Pasien Tidak Dapat Memberikan Persetujuan	72

C. Pihak-pihak yang Berhak Memberikan Persetujuan / Penolakan Apabila Terjadi Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan.....	77
D. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Dokter dalam Hal Penanganan Pasien Dalam Keadaan Darurat yang Membutuhkan Pembedahan.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP